

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan/ *verbinten*is dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Dasar hukum perdata tersebut tertuang dalam pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: suatu perikatan, dimana suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan/ perjanjian atau undang-undang. Perikatan yang tertuang dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum (*Onrechmatig*). Fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan *Onrechmatigedaad*. Adapun perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik dikarenakan tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya¹.

Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih condong kepada struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah konkrit. Oleh karenanya substansi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata memerlukan materialisasi diluar kebijakan tersebut. Perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut

¹ Agustina Rosa. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan ke-III. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm. 03

harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai perbuatan yang menimbulkan kerugian sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan suatu masyarakat².

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang akan menimbulkan dampak terhadap neraca keseimbangan hubungan hukum dengan pihak lain yang terikat dengannya. Dampak yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil maupun secara imateriil. Demi mempertahankan haknya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum tersebut berupa gugatan ganti rugi. Berkenaan dengan permasalahan yang diangkat penulis, perbuatan melawan hukum didasarkan pelanggaran terhadap perjanjian kredit/ *loan agreement* antara nasabah dengan lembaga perbankan. Kredit telah didefinisikan dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk mengukur kemampuan nasabah dalam melaksanakan prestasinya, maka nasabah wajib menjaminkan hak kebendaan miliknya sebagai jaminan atau yang biasa disebut agunan dalam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis

² Ibid. Hlm.05

agunan yang dapat dijaminkan kepada bank untuk memperoleh fasilitas kredit dapat berupa barang, proyek, dan hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam penelitian penulis, objek jaminan/ agunan yang digunakan debitur adalah tanah. Dasar yuridis khusus terhadap tanah yang dijadikan jaminan adalah UU Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Sebelum memberikan jaminan kredit terhadap nasabah, pihak bank wajib untuk melakukan analisis mendalam atas itikad baik nasabah dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 UU Perbankan. Pokok Permasalahan yang menjadi pokok penelitian tugas akhir penulis adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2375/ K/ PDT/ 2015 yang berkekuatan hukum tetap/ *inkracht* tentang penolakan permohonan kasasi Fatah Wali Achmad dalam perkara perbuatan melawan hukum yang sebelumnya terlebih dahulu diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi No. 75/ Pdt/ 2015/ PT. Surabaya *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri No. 261/ Pdt.G/ 2013/ PN. Malang. Adapun para pihak yang berperkara yakni sebagai berikut:

- 1) Fatah Wali Achmad selaku (Pemohon Kasasi) dahulu (Pembanding) dahulu (Tergugat) melawan:
- 2) Njo. Hendry Saputra selaku (Termohon Kasasi) dahulu (Terbanding) dahulu (Penggugat).

Selanjutnya permasalahan bermula saat Njo. Hendry Saputra/ Penggugat selaku pemenang lelang beberapa objek tanah sebagaimana Kutipan Grosse Risalah Lelang Nomor 1970/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan

oleh Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Kota Malang yang mana objek-objek yang dipersengketakan dahulunya dimiliki oleh Fatah Wali Achmad/ Tergugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada 30 Desember 2013. Kemudian Tergugat dalam perkara tersebut mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi kepada Penggugat, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian hingga putusan.

Dalam amarnya, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan putusan No. 261/ Pdt.G/ 2013/ PN. Malang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya. Perkara kemudian berlanjut hingga tahap banding dimana Tergugat tidak puas dengan amar putusan yang diberikan hakim pengadilan *Judex factie* I dimana Tergugat mengajukan memori banding pada 15 September 2014. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 September 2014 Nomor: 261 / Pdt.G / 2013 / PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut.

Kemudian Pembanding yang tidak puas dengan amar putusan *Judex Factie II* tersebut Kembali mengajukan Kasasi pada 12 Mei 2015. Pasca dilakukan pemeriksaan di tingkat *Judex Juris*, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2375/ K/ PDT/ 2015 tersebut memberikan amar tolak. Menanggapi uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan

tema “**Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2375K/PDT/2015 tentang Perbuatan Melawan Hukum di Tinjau dari Prespektif Tujuan Hukum**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 2375K/PDT/2015 memenuhi unsur perbuatan melawan hukum?
2. Apakah implikasi putusan hakim Mahkamah Agung sesuai dengan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2375K/ PDT/ 2015 berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum.
2. Mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam memeriksa dan mengadili putusan Mahkamah Agung Nomor 2375K/ PDT/ 2015 apabila ditinjau berdasarkan perspektif tujuan hukum

D. Manfaat dan Kegunaan

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya pemahaman tentang mata kuliah hukum perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan dan penelitian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan agar lebih efisien dengan pemahaman tentang hukum keperdataan di Indonesia.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses berpikir untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dimana terdapat beberapa jenis pendekatan yang hendak digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah seluruh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi, pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji himpunan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai upaya membentuk argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat serta pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan

menelaah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap khususnya di bagian pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara³.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2375K/PDT/2015, Putusan Pengadilan Tinggi No. 75/ Pdt/ 2015/ PT. Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri No. 261/ Pdt.G/ 2013/ PN. Malang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, jurnal hukum, surat kabar, internet, dan artikel yang memuat substansi dari objek permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik tersebut dilakukan dengan pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai buku maupun literatur yang telah dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan

³ Ibrahim, Johny. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-IV. Bayumedia Publishing: Malang. Hlm. 33

yang didasarkan pada objek penelitian berupa data-data yang menjadi fokus kajian dan disusun secara komperhensif⁴. Data-data tersebut berisi uraian logis yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tersebut, maka akan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode yang digunakan sebagai analisa dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan inventarisasi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian dilakukan seleksi terhadap norma-norma, himpunan doktrin, dan asas-asas yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai konsep pendukung pembahasan. Data yang hendak dianalisis akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan diinterpretasikan sehingga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini⁵. Ketidaksesuaian

⁴ Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 20

⁵ Abdulkadir, Muhammad. 2008. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 142.

antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang menjadikan pokok permasalahan diangkat oleh penulis akan diinterpretasikan berdasarkan fakta hukum yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membagi ke dalam 4 bagian yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan serta metode penulisan yang terdiri atas metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum yang merujuk kepada pokok permasalahan yang diangkat penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan berbagai macam ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Selain itu juga berkenaan dengan himpunan doktrin dan kajian teoritik yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan tugas akhir.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang inti permasalahan yang dianalisis sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Dalam hal ini, terdapat 3 putusan pengadilan perdata yang terdiri dari tingkat pertama, banding dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga putusan tersebut akan dikaji komperhensif oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan/ konklusi dari pembahasan tugas akhir dan saran penulis terkait objek permasalahan yang diangkat.

